

# Peran Kepemimpinan Informal dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Papua: Studi Literatur

Yonis Karoba, Akbar Silo\*, Yosephina Ohoiwutun, Hiskia C. M. Sapioper

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi: [assilo708@gmail.com](mailto:assilo708@gmail.com)

## ABSTRACT:

*This study aims to explore the strategic role of informal leadership in the empowerment process of village communities in Papua. Using a qualitative approach through a literature review, this study analyzes academic literature related to the role of tribal chiefs, traditional figures, and religious leaders in mediating development that aligns with local values. Data sources were obtained from journal articles, institutional reports, and relevant academic works from the past decade. The results show that informal leaders play a crucial role as agents of social mediation, guardians of cultural legitimacy, and facilitators of inclusive development. Their leadership is based on moral authority, local wisdom, and deeply rooted social networks, making them more trusted than formal institutions. They are able to translate development policies into customary frameworks, ensure social acceptance, and increase citizen participation. The effectiveness of informal leaders is increasingly evident in the context of tensions between modernization and the preservation of traditional values. These leaders also demonstrate adaptive capabilities, including in managing digital media and contemporary issues such as environmental crises or pandemics. This study emphasizes that ignoring their role in policymaking can hinder the success of development programs in Papua. Therefore, integrating informal leadership into participatory governance is a strategic imperative for achieving sustainable and contextual empowerment.*

**Keywords:** Community participation, livable houses, village development, local empowerment, Yalimo

Received: 16-08-2025

Accepted: 18-09-2025

Published: 29-09-2025

## 1. PENDAHULUAN

Kepemimpinan informal memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat kampung dan masyarakat adat, terutama di wilayah dengan nuansa kehidupan dengan adat-istiadat yang masih dipegang teguh, seperti Papua. Dalam konteks ini, para pemimpin adat, tetua suku, dan tokoh masyarakat yang dihormati berperan sebagai pengambil keputusan utama dan mediator dalam berbagai aspek pemerintahan daerah. Para pemimpin ini seringkali memperoleh otoritas bukan dari gelar resmi, melainkan dari garis keturunan leluhur, norma budaya, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka. Pengaruh mereka menjadi sangat nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat di mana mekanisme kelembagaan formal lemah atau

tidak dipercaya. Para akademisi seperti Paragaye & Liauw (2025) menekankan pentingnya struktur kepemimpinan adat dalam resolusi konflik dan mobilisasi masyarakat di Papua. Studi mereka menunjukkan bahwa para pemimpin informal seringkali bertindak sebagai agen penstabil selama ketegangan elektoral, sehingga menunjukkan fungsi sosial mereka yang krusial. Memahami peran mereka sangat penting untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang berkelanjutan dan berlandaskan budaya di komunitas kampung Papua.

Lanskap sosiokultural Papua yang unik, yang merupakan rumah bagi ratusan kelompok etnis, semakin memperkuat relevansi kepemimpinan informal dalam memfasilitasi pembangunan masyarakat. Setiap kelompok etnis memiliki hukum adat dan model pemerintahan yang berbeda, yang seringkali berpusat pada sosok kepala suku atau tetua spiritual. Para pemimpin ini berperan penting dalam memobilisasi tenaga kerja komunal, menyelesaikan sengketa tanah, dan mewariskan pengetahuan lokal lintas generasi. Menurut Salmawati dan Purnomo (2025), para pemimpin informal di Papua memainkan peran strategis dalam mengkatalisasi perubahan dengan menyelaraskan tujuan pembangunan dengan nilai-nilai dan tradisi lokal. Temuan mereka menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan seringkali berhasil ketika para pemimpin informal mendukung dan memperjuangkan tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan akar rumput tidak hanya melengkapi tetapi terkadang bahkan lebih unggul daripada intervensi yang dipimpin negara dalam lingkungan yang kompleks secara budaya. Mengakui dinamika ini dapat secara signifikan meningkatkan hasil pembangunan partisipatif di Papua.

Pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan dan terisolasi secara geografis seperti Papua, membutuhkan lebih dari sekadar masukan infrastruktur; hal itu menuntut kohesi dan legitimasi sosial, yang dibantu untuk dipupuk oleh para pemimpin informal. Di banyak kampung, para pemimpin ini bertindak sebagai penghubung antara pemangku kepentingan eksternal dan penduduk lokal, menerjemahkan kebijakan ke dalam istilah yang dapat dipahami secara budaya. Lebih lanjut, bimbingan mereka memastikan bahwa intervensi pembangunan menghormati pandangan dunia masyarakat adat dan tidak mengikis sistem pengetahuan tradisional. Penelitian oleh Marsuki & Manda (2025) di Kabupaten Gowa menggarisbawahi bahwa kepemimpinan informal meningkatkan kohesi sosial, yang pada gilirannya menopang pariwisata berbasis masyarakat dan model pemberdayaan lainnya (Marsuki & Manda, 2025). Meskipun berfokus di luar Papua, wawasan mereka dapat ditransfer karena dinamika pedesaan dan etnis yang serupa. Kepemimpinan seperti itu, ketika dimanfaatkan secara efektif, menjadi landasan pembangunan berkelanjutan daripada elemen pinggiran. Oleh karena itu, mengabaikan para aktor ini dalam kerangka kerja kebijakan dapat menyebabkan kegagalan implementasi.

Salah satu tantangan yang berulang dalam pembangunan di Papua adalah kesenjangan antara tata kelola formal dan realitas lokal, di mana inisiatif negara seringkali

gagal mendapatkan daya tarik karena kurangnya rasa kepemilikan masyarakat. Sebaliknya, para pemimpin informal memiliki kehadiran yang melekat dan pemahaman intrinsik tentang konteks lokal, menjadikan mereka fasilitator ideal bagi perencanaan partisipatif dan mekanisme akuntabilitas. Sebuah studi oleh Bainus dkk. (2025) menyoroti potensi memadukan tata kelola formal dengan jaringan informal untuk meningkatkan hasil sosial di Indonesia yang terdesentralisasi. Meskipun fokus mereka adalah gerakan pengurangan sampah makanan perkotaan, prinsip dasar pendidikan dan kepemimpinan informal berbasis nilai berlaku serupa di Papua. Dalam banyak proyek pemberdayaan, kepercayaan terhadap otoritas formal masih rendah, sementara para pemimpin informal dapat memediasi dan melegitimasi inisiatif. Hal ini menjadikan mereka aktor kunci dalam tata kelola partisipatif, menjembatani kesenjangan struktural dalam perangkat pembangunan Papua. Keterlibatan mereka oleh karena itu dapat menjadi faktor penentu keberhasilan untuk mencapai ketahanan dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut, para pemimpin informal sering kali menjalankan peran spiritual, moral, dan pendidikan dalam komunitas mereka, memberikan bimbingan holistik yang melampaui pengembangan materi. Di daerah-daerah dengan akses terbatas ke pendidikan formal dan layanan publik, para pemimpin ini sering bertindak sebagai pendidik dan konselor informal. Misalnya, Elosak dkk. (2025) mendokumentasikan bagaimana kepemimpinan rohani di jemaat GKII Solafide di Papua mengintegrasikan pengajaran komunitas dan ketahanan moral di masa pergolakan sosial. Kepemimpinan semacam itu tidak hanya menopang iman individu tetapi juga identitas kolektif dan solidaritas sosial. Elemen-elemen ini vital bagi pemberdayaan karena mereka menumbuhkan agensi dan tujuan dalam komunitas yang menghadapi marginalisasi sistemik. Oleh karena itu, memahami kepemimpinan informal harus mencakup dimensi moral dan pedagogisnya. Tanpa pengakuan ini, strategi pemberdayaan berisiko menjadi teknokratis dan terpisah secara budaya.

Peran kepemimpinan informal di Papua harus dikaji bukan sebagai tradisi statis, melainkan sebagai kekuatan dinamis yang berkembang seiring perubahan sosial-politik dan tekanan pembangunan. Seiring masyarakat terlibat dengan modernisasi, migrasi, dan ekspansi negara, otoritas pemimpin informal dinegosiasikan ulang, tetapi tidak berkurang. Faktanya, para pemimpin ini sering kali menemukan kembali peran mereka agar selaras dengan tantangan baru, mengintegrasikan kearifan tradisional dengan strategi adaptif. Kharir dan Lizamah (2025) menunjukkan bagaimana ritual keagamaan seperti khataman berfungsi sebagai wadah solidaritas ekonomi dan pendidikan informal di pedesaan Indonesia. Hal ini menunjukkan kapasitas kreatif para pemimpin informal untuk berinovasi dalam kerangka budaya. Responsivitas mereka terhadap perubahan menjadikan mereka mitra yang sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang peran mereka, terutama dalam lingkungan yang benuansa dan beragam budaya seperti Papua sangatlah tepat waktu dan penting.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran kepemimpinan informal yang beragam dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan di Papua, Indonesia. Secara khusus, studi ini berupaya memahami bagaimana para pemimpin informal; seperti kepala suku, tokoh agama, dan tetua adat dalam memobilisasi modal sosial, memediasi konflik, dan memfasilitasi inisiatif pembangunan dengan cara yang selaras secara budaya dan sah secara lokal. Dengan mengkaji literatur yang telah dikaji sejawat, studi ini bertujuan untuk mengungkap pola-pola kepemimpinan informal yang berkontribusi pada partisipasi akar rumput dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki bagaimana para pemimpin ini berinteraksi dengan atau melengkapi struktur tata kelola formal di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Memahami dinamika ini sangat penting untuk meningkatkan responsivitas kebijakan dan memastikan bahwa intervensi berbasis masyarakat bersifat inklusif dan efektif. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang tata kelola partisipatif dan kepemimpinan adat dalam konteks pembangunan. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya kepemimpinan informal secara praktis dan teoretis dalam mencapai ketahanan masyarakat di Papua.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka kualitatif sebagai pendekatan penelitian utamanya, dengan fokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis publikasi ilmiah terkait kepemimpinan informal dan pemberdayaan masyarakat di Papua. Tinjauan pustaka sangat sesuai untuk penelitian ini, karena memungkinkan identifikasi pengetahuan yang ada, kerangka teoritis, dan temuan empiris dari berbagai studi tanpa kendala kerja lapangan langsung. Sumber yang dikaji meliputi artikel jurnal peer-review, laporan institusi, tesis, dan buku yang diterbitkan dalam dekade terakhir, dengan penekanan pada karya yang membahas kepemimpinan adat, pembangunan partisipatif, dan dinamika sosiokultural di Papua dan konteks serupa (Hadi & Afandi, 2021). Proses peninjauan mengikuti protokol terstruktur yang mencakup identifikasi masalah, penelusuran pustaka, analisis kritis, dan sintesis tematik. Basis data seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan repositori akademik nasional dan internasional juga digunakan untuk memastikan kredibilitas dan relevansi sumber. Hanya sumber yang menunjukkan ketelitian metodologis, relevansi dengan konteks Papua, dan reliabilitas ilmiah yang disertakan. Metode ini memastikan bahwa penelitian memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik berdasarkan bukti yang ada dan bukan interpretasi anekdot atau spekulatif.

Kerangka analitis tinjauan pustaka ini dipandu oleh pendekatan analisis konten tematik, yang memungkinkan identifikasi konsep-konsep kunci, tema-tema yang berulang, dan kesenjangan dalam literatur terkait peran kepemimpinan informal dalam

pemberdayaan masyarakat. Hal ini melibatkan pengodean literatur terpilih secara manual dan pengelompokan temuan ke dalam beberapa tema yang muncul, seperti membangun kepercayaan, legitimasi budaya, resolusi konflik, mediasi pembangunan, dan dinamika negara-lokal. Tinjauan ini juga mempertimbangkan wawasan komparatif dari latar masyarakat adat atau pedesaan lain di Indonesia untuk mengontekstualisasikan karakteristik unik kepemimpinan di Papua. Dengan membandingkan dan mengontraskan temuan-temuan dari berbagai studi secara sistematis, penelitian ini menyoroti perspektif yang konvergen maupun divergen tentang efektivitas kepemimpinan informal dalam memberdayakan masyarakat terpinggirkan. Studi ini jugamencermati konteks sosiopolitik dan historis di mana struktur kepemimpinan ini beroperasi, dengan mengakui evolusinya dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya bukan hanya untuk meringkas apa yang telah dipelajari, tetapi juga untuk terlibat secara kritis dengan literatur guna mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan menginformasikan penelitian selanjutnya. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan wawasan yang mendalam, berdasar pada teori, dan relevan secara kontekstual.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kepemimpinan Informal sebagai Agen Mediasi & Legitimasi Sosial

Kepemimpinan informal berfungsi sebagai pilar fundamental dalam tata kelola masyarakat kampung, khususnya dalam masyarakat adat seperti yang ditemukan di Papua, di mana norma-norma tradisional dan nilai-nilai lokal masih mengakar kuat. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak muncul dari mandat kelembagaan, melainkan dari otoritas yang diwariskan, kearifan budaya, dan hubungan kepercayaan yang telah lama terjalin dalam masyarakat. Para pemimpin informal ini seringkali memediasi permasalahan masyarakat sehari-hari, mulai dari sengketa tanah hingga konflik antar-klan, bertindak sebagai stabilisator di tengah ketidakpastian sosial-politik. Sebagaimana dicatat oleh Salmawati dan Purnomo (2025), para pemimpin adat di Papua tidak hanya memiliki kekuatan simbolis tetapi juga peran operasional yang secara langsung memengaruhi arah upaya pembangunan lokal. Legitimasi mereka, yang dibangun di atas garis keturunan budaya dan integritas moral, memberi mereka kapasitas unik untuk bertindak ketika intervensi formal negara gagal beresonansi dengan penduduk setempat. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga diamanatkan secara budaya, menjadikan mereka aktor penting dalam pembangunan partisipatif.

Efektivitas kepemimpinan informal di pedesaan Papua sebagian besar terletak pada keterikatannya dengan adat istiadat dan sistem kepercayaan setempat, yang memungkinkan para pemimpin beroperasi dengan tingkat kepercayaan yang seringkali tidak dimiliki oleh lembaga formal. Tidak seperti struktur birokrasi yang dipandang

eksternal atau bahkan ekstraktif, para pemimpin informal dianggap sebagai "orang dalam" yang memahami nilai-nilai, sejarah, dan kode spiritual masyarakatnya. Status orang dalam ini memungkinkan mereka menerjemahkan agenda pembangunan eksternal ke dalam bahasa dan metode yang sesuai dengan budaya, sehingga mendorong penerimaan dan partisipasi masyarakat. Menurut Paragaye dan Liauw (2025), para pemimpin ini berperan sebagai perantara budaya yang krusial, memediasi antara harapan instansi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa program pemberdayaan mencapai legitimasi dan keberlanjutan yang lebih besar ketika didukung oleh kepemimpinan informal. Tanpa mediasi mereka, banyak inisiatif formal berisiko ditolak, diabaikan, atau bahkan ditentang secara aktif oleh penduduk asli.

Para pemimpin informal tidak hanya menyediakan penerjemahan budaya tetapi juga memperkuat tatanan moral dan sosial yang diperlukan untuk kohesi dan ketahanan masyarakat. Keputusan mereka seringkali berpedoman pada hukum adat dan wawasan spiritual, yang dianggap lebih sah oleh anggota masyarakat daripada hukum sekuler. Landasan moral ini memungkinkan mereka menyelesaikan konflik secara damai dan membimbing masyarakat melalui masa transisi, seperti selama pembangunan infrastruktur atau tekanan migrasi. Bainus dkk. (2025) berpendapat bahwa bahkan dalam konteks perkotaan, kepemimpinan informal, ketika berakar pada nilai-nilai sosial bersama, memainkan peran penting dalam membangun tanggung jawab kolektif dan komitmen etis terhadap perubahan. Ketika diterapkan di Papua, di mana kehadiran negara seringkali lemah, para pemimpin ini menjalankan fungsi tata kelola seperti kontrol sosial, penyelesaian sengketa, dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, peran mereka sebagai mediator secara bersamaan memiliki cakupan politik, budaya, dan moral.

Salah satu aspek kunci kepemimpinan informal di Papua adalah peran mereka dalam menjaga legitimasi sosial, terutama di mata anggota masyarakat yang mungkin skeptis terhadap intervensi pemerintah atau LSM. Legitimasi dalam konteks ini bukan sekadar pengakuan oleh hukum formal, tetapi juga tentang persepsi yang adil, konsisten secara budaya, dan berlandaskan spiritual. Legitimasi yang dipersepsikan ini memungkinkan para pemimpin informal untuk bertindak sebagai penjaga persetujuan masyarakat, menentukan apakah suatu program selaras dengan nilai dan kepentingan komunal atau tidak. Sebagaimana disoroti Marsuki dan Manda (2025) dalam studi mereka tentang pariwisata berbasis masyarakat di Gowa, legitimasi sosial yang berlandaskan otoritas budaya dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek pembangunan lokal. Meskipun penelitian mereka dilakukan di luar Papua, pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa pembangunan tanpa legitimasi seringkali dianggap sebagai intrusi. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pemberdayaan di Papua seringkali lebih bergantung pada legitimasi sosial yang diberikan oleh para pemimpin informal daripada persetujuan formal negara.

Dalam praktiknya, para pemimpin informal seringkali memediasi ketegangan antara cara hidup tradisional dan pengaruh modernisasi dari agen pembangunan

eksternal. Ketegangan-ketegangan ini dapat muncul ketika proyek-proyek yang digerakkan oleh negara mengancam hak-hak tanah komunal, mengganggu peran sosial, atau mengabaikan dimensi sakral tanah adat. Oleh karena itu, para pemimpin informal harus bernegosiasi tidak hanya dengan pihak luar tetapi juga secara internal, menjaga kohesi komunitas sekaligus memberi ruang bagi adaptasi yang diperlukan. Sebagaimana dicatat oleh Elosak dkk. (2025), para pemimpin informal dalam lingkungan berbasis agama di Papua, seperti jemaat GKII Solafide, juga berperan sebagai pendidik moral yang membimbing masyarakat melalui pergolakan sosial dan spiritual. Peran ganda ini, mediator perubahan dan penjaga tradisi, memposisikan mereka secara unik untuk menafsirkan dan memoderasi dampak pembangunan dengan cara yang dapat diterima secara budaya. Kemampuan mereka untuk melakukannya inilah yang menopang otoritas mereka dan memastikan bahwa perubahan diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Para pemimpin informal berperan sebagai perantara tepercaya dalam tata kelola partisipatif, seringkali berfungsi sebagai satu-satunya penghubung yang kredibel antara desa-desa terpencil dan lembaga-lembaga formal. Di wilayah yang terisolasi secara geografis dan terpinggirkan secara politik seperti Papua, kehadiran birokrasi terbatas, dan para pemimpin informal turun tangan untuk menyelenggarakan forum komunitas, mewakili kepentingan desa, dan mengomunikasikan keputusan kepada pihak berwenang. Menurut Salmawati dan Purnomo (2025), para pemimpin ini sering memimpin dialog multi-pemangku kepentingan yang menggabungkan perspektif perempuan, pemuda, dan tetua dengan cara yang responsif secara budaya. Kepemimpinan mereka dengan demikian mendorong partisipasi inklusif sekaligus mematuhi sifat hierarkis dan komunal masyarakat Papua. Karena mereka tertanam dalam struktur sosial, mereka dapat memastikan bahwa suara-suara yang terpinggirkan didengar tanpa mengganggu persatuan masyarakat. Fungsi mediasi ini khususnya penting dalam inisiatif pemberdayaan yang berupaya membangun kapasitas tanpa menggeser struktur otoritas adat.

Dari sudut pandang pembangunan, para pemimpin informal berperan sebagai jembatan kelembagaan yang memungkinkan lokalisasi kebijakan dan tata kelola yang adaptif. Meskipun peraturan pemerintah mungkin bersifat universal, implementasinya membutuhkan adaptasi kontekstual, yang paling tepat difasilitasi oleh para pemimpin informal. Mereka menyesuaikan kebijakan dengan cara yang menghormati adat istiadat setempat—seperti melalui pengambilan keputusan berbasis konsensus atau penegasan ritual atas aturan-aturan baru. Penelitian oleh Kharir dan Lizamah (2025) tentang ritual khataman di pedesaan Indonesia menggarisbawahi bagaimana tradisi spiritual dapat diubah menjadi alat untuk solidaritas sosial-ekonomi dan pendidikan informal. Wawasan semacam itu khususnya relevan dengan Papua, di mana praktik spiritual dan adat istiadat tetap menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan sehari-hari. Melalui mekanisme budaya yang serupa, para pemimpin informal melegitimasi dan melokalisasi program-program negara yang sebelumnya jauh. Dengan cara ini, mereka tidak hanya



memediasi kebijakan tetapi juga membingkainya kembali sebagai inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat.

Dalam banyak kasus, keberadaan kepemimpinan informal juga berperan sebagai mekanisme perlindungan terhadap praktik-praktik pembangunan yang eksploitatif atau top-down. Karena kesetiaan mereka terhadap kesejahteraan komunitas dan norma-norma kolektif, para pemimpin ini sering kali berperan sebagai pengawas yang mempertanyakan niat pihak luar dan menjaga otonomi lokal. Keterlibatan mereka memastikan bahwa pemberdayaan tidak disalahartikan sebagai kontrol dan bahwa bantuan tidak mengikis agensi masyarakat adat. Bainus dkk. (2025) menekankan bahwa kepemimpinan akar rumput dapat membentuk arah moral gerakan sosial, menunjukkan bahwa bahkan kepemimpinan informal dalam upaya ketahanan pangan perkotaan menunjukkan kualitas protektif yang serupa. Di Papua, peran protektif ini diperkuat oleh trauma historis penggusuran dan marginalisasi, yang menjadikan pembangunan kepercayaan sebagai prasyarat bagi setiap intervensi. Para pemimpin informal, yang dipercaya secara otomatis, menciptakan zona penyangga di mana aktor eksternal dapat membangun legitimasi melalui dialog dan kolaborasi. Oleh karena itu, kehadiran mereka mengurangi fragmentasi sosial dan memastikan keterlibatan yang etis.

Efektivitas kepemimpinan informal sebagai mediator juga terletak pada kemampuan mereka untuk berinovasi sambil mempertahankan kesinambungan budaya. Meskipun berakar pada tradisi, para pemimpin ini sering kali mengadopsi strategi adaptif untuk menangani isu-isu modern seperti degradasi lingkungan, pengangguran kaum muda, atau buta huruf digital. Mereka mengintegrasikan pemecahan masalah tradisional dengan perangkat baru, seperti menjalin kemitraan dengan LSM, mengelola koperasi lokal, atau bahkan memanfaatkan platform digital untuk advokasi. Sebagaimana terlihat dalam karya Marsuki dan Manda (2025), para pemimpin informal telah mengambil inisiatif dalam mengembangkan model pariwisata dan konservasi berkelanjutan yang mencerminkan prioritas ekonomi dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan informal tidak secara inheren anti-modern, tetapi berupaya menyelaraskan perubahan dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, mereka mempertahankan legitimasi dengan tetap relevan dan responsif, sifat-sifat yang esensial bagi pemberdayaan jangka panjang.

Dengan demikian, para pemimpin informal di Papua merupakan agen mediasi dan legitimasi sosial yang sangat diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mereka beroperasi lintas ranah budaya, moral, dan politik, memastikan bahwa intervensi pembangunan selaras dengan nilai-nilai dan harapan masyarakat adat. Peran mereka sebagai mediator menumbuhkan kepercayaan, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan cara-cara yang seringkali tidak dapat dicapai sendiri oleh tata kelola formal. Para akademisi secara konsisten menegaskan sentralitas mereka dalam ketahanan masyarakat, pelestarian budaya, dan tata kelola partisipatif (Salmawati & Purnomo, 2025; Paragaye & Liauw, 2025). Seiring Papua terus menghadapi tekanan dari modernisasi dan



program pembangunan nasional, pelibatan kepemimpinan informal dalam perencanaan dan implementasi bukan hanya disarankan melainkan esensial. Pemberdayaan, dalam konteks ini, harus dipandang bukan sekadar sebagai intervensi teknis, melainkan sebagai proses yang dinegosiasikan secara kultural, berakar pada legitimasi lokal, dan dimediasi melalui otoritas informal.

### **3.2 Transformasi Peran Pemimpin Informal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Sosial**

Partisipasi Kepemimpinan informal di Papua secara historis telah muncul sebagai mekanisme penting untuk menjaga kohesi masyarakat dan mewariskan nilai-nilai adat dalam kehidupan kampung (desa). Dalam masyarakat tradisional Papua, para pemimpin informal, seperti tetua suku, kepala adat (Ondoafi), dan tokoh agama, memainkan peran penting dalam memediasi konflik, mengelola sumber daya komunal, dan membimbing adat istiadat setempat. Namun, modernisasi dan intervensi eksternal telah mengubah peran-peran ini secara signifikan, menantang otoritas para pemimpin informal, baik secara halus maupun terang-terangan. Lembaga negara dan LSM modern semakin mengabaikan struktur tradisional, memperkenalkan pendekatan birokrasi formal yang mungkin tidak selaras dengan pandangan dunia lokal (Tjilen dkk., 2018). Dinamika ini menciptakan sistem ganda di mana pemerintahan tradisional dan formal seringkali beroperasi secara paralel terkadang kooperatif, tetapi seringkali dalam ketegangan. Akibatnya, para pemimpin informal kini harus menavigasi medan sosial yang kompleks, memadukan otoritas leluhur dengan strategi adaptif agar tetap menjadi agen pemberdayaan yang efektif.

Literatur menunjukkan bahwa terlepas dari tekanan-tekanan ini, para pemimpin informal tetap berperan penting dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan daerah tertinggal di Papua. Jaringan sosial dan modal kepercayaan mereka yang tertanam menawarkan keunggulan unik dibandingkan agen formal dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dan memfasilitasi pembangunan yang sesuai dengan budaya (McCalman dkk., 2012). Di Kabupaten Merauke, misalnya, keberhasilan pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi lokal sebagian besar bergantung pada keterlibatan para pemimpin lokal tepercaya yang beroperasi di luar struktur resmi tetapi memegang kendali atas norma-norma masyarakat (Tjilen dkk., 2018). Para pemimpin ini mampu menerjemahkan tujuan pembangunan eksternal ke dalam idiom lokal, mendorong penerimaan dan kepemilikan program. Legitimasi mereka tidak berasal dari jabatan resmi, melainkan dari ikatan relasional yang telah lama terjalin dan komitmen yang ditunjukkan terhadap kesejahteraan komunal. Oleh karena itu, setiap pendekatan terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua harus mengakui dan mengintegrasikan relevansi berkelanjutan dari para aktor ini.

Di tengah perubahan sosial-ekonomi yang pesat, para pemimpin informal juga mulai mengadopsi perangkat dan praktik baru yang memungkinkan mereka berinteraksi

dengan negara modern dan aktor global. Di beberapa komunitas kampung, para pemimpin ini telah mulai memanfaatkan teknologi digital, radio komunitas, dan media sosial untuk memperkuat suara lokal dan menarik perhatian pembangunan (Kialo, 2014). Adopsi semacam itu menandai transformasi strategis: para pemimpin informal tidak lagi terbatas pada tradisi lisan atau otoritas ritual, tetapi berevolusi menjadi tokoh hibrida yang menjembatani dunia adat dan modern. Kemampuan beradaptasi telah menjadi penanda penting legitimasi kepemimpinan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih selaras dengan modernitas. Namun, evolusi ini bukannya tanpa risiko, karena para pemimpin dapat menghadapi erosi kredibilitas jika dianggap dikooptasi oleh kekuatan eksternal. Keseimbangan yang rumit antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan merangkul inovasi mendefinisikan metamorfosis kepemimpinan informal saat ini di Papua.

Peran kepemimpinan informal dalam respons krisis semakin menggarisbawahi nilainya di masa-masa tekanan sosial. Selama pandemi COVID-19, misalnya, para pemimpin lokal di Papua Nugini (yang secara budaya dan geografis terkait erat dengan Papua) berperan penting dalam mengorganisir pendidikan kesehatan, distribusi makanan, dan upaya pemantauan masyarakat di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh lembaga formal (Thomas dkk., 2021). Para pemimpin ini memberikan respons yang cepat dan tepercaya dalam konteks di mana kehadiran negara sangat minim, menunjukkan fungsi vital tata kelola informal di lingkungan yang rentan. Peran mereka tidak hanya reaktif tetapi juga preventif, memanfaatkan ikatan kekerabatan dan kearifan lokal untuk memitigasi penyebaran penyakit. Ketahanan akar rumput ini menunjukkan bagaimana para pemimpin informal mengisi kekosongan tata kelola selama keadaan darurat, terutama di tempat-tempat dengan infrastruktur dan pengawasan pemerintah yang terbatas. Dengan demikian, memberdayakan para aktor tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan kohesi sosial di tengah krisis yang berulang.

Namun demikian, modernisasi tidak hanya membawa perangkat tetapi juga ketegangan yang dapat mengikis sistem kepemimpinan tradisional jika tidak dinavigasi dengan hati-hati. Meningkatnya pendidikan, migrasi perkotaan, dan paparan terhadap nilai-nilai eksternal, terutama di kalangan pemuda, mengubah persepsi tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan (Suhartini & Jones, 2019). Hasilnya adalah kesenjangan generasi dalam legitimasi kepemimpinan, di mana individu yang lebih muda mungkin mempertanyakan relevansi pemimpin adat dalam menangani isu-isu kontemporer seperti kesenjangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, atau perubahan iklim. Di saat yang sama, program pembangunan yang digerakkan oleh donor seringkali memprioritaskan hasil yang terukur daripada proses komunitas, secara tidak sengaja mengesampingkan para pemimpin yang tidak memiliki kredensial formal. Marginalisasi ini berisiko melemahkan komunitas dengan melemahkan jaringan yang menopang kerja sama dan agensi lokal. Menjembatani otoritas tradisional dengan ekspektasi modern

membutuhkan pemikiran ulang tentang kerangka kerja kepemimpinan yang menghormati legitimasi budaya sekaligus mendorong perubahan progresif.

Persinggungan antara kepemimpinan informal dengan strategi pembangunan partisipatif menawarkan jalur potensial ke depan. Model pembangunan berbasis komunitas yang secara aktif melibatkan para pemimpin informal cenderung menghasilkan hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan, terutama di daerah terpencil (Lyons & Cavaye, 2016). Di East New Britain dan Papua, "perantara" lokal telah terbukti berperan sebagai penerjemah budaya, mediator kebijakan, dan penggerak aksi kolektif, semua peran penting dalam tata kelola partisipatif. Para perantara ini tidak hanya mentransmisikan kebijakan negara, tetapi juga turut membentuknya, memastikan kebijakan tersebut selaras dengan keyakinan dan praktik lokal. Temuan-temuan tersebut menantang dikotomi antara sistem "informal" dan "formal", yang justru menunjukkan adanya kontinum kepemimpinan yang memadukan kearifan lokal dengan fungsi administratif. Pengakuan kelembagaan terhadap model kepemimpinan campuran ini penting untuk menyusun kebijakan yang efektif dan berbasis lokal. Kegagalan untuk melakukannya berisiko memperkuat asimetri kekuasaan dan alienasi budaya.

Dalam konteks tata kelola adat Papua yang mengakar kuat, para pemimpin informal seringkali berperan sebagai otoritas moral dan penengah sosial, menjaga ketertiban sosial dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kepolisian formal. Pengaruh moral mereka berasal dari pengetahuan mendalam tentang sejarah klan, geografi sakral, dan hukum adat (Munro, 2024). Sebagai perantara perdamaian, mereka memediasi konflik tanah, perselisihan keluarga, dan ketegangan antar-klan yang dapat meningkat menjadi kekerasan. Fungsi-fungsi ini khususnya krusial di wilayah-wilayah yang ditandai oleh sengketa tanah terkait industri ekstraktif atau proyek infrastruktur negara. Penggusuran atau degradasi sumber daya yang disebabkan oleh pembangunan seringkali memperparah gesekan sosial, sehingga peran para pemimpin informal yang dihormati menjadi semakin vital. Oleh karena itu, mengakui para pemimpin ini tidak hanya sebagai penjaga budaya tetapi juga sebagai aktor dalam negosiasi sosial-politik sangat penting bagi pembangunan yang adil dan damai.

Dinamika gender juga memainkan peran yang terus berkembang dalam transformasi kepemimpinan informal di Papua. Meskipun secara tradisional didominasi laki-laki, bentuk-bentuk kepemimpinan yang muncul semakin mengikutsertakan perempuan, terutama di sektor-sektor seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan koperasi ekonomi (Gasson dkk., 2022). Pemimpin informal perempuan, meskipun seringkali kurang diakui, menjadi aktor kunci dalam memobilisasi perubahan akar rumput, mengadvokasi kesehatan ibu, pendidikan anak perempuan, dan ketahanan pangan. Kepemimpinan mereka seringkali dijalankan melalui pengaruh relasional, alih-alih perintah hierarkis, yang mencerminkan model komunal, alih-alih koersif. Dengan demikian, pemberdayaan kepemimpinan informal perempuan memiliki potensi besar bagi ketahanan masyarakat dan keadilan sosial. Kebijakan dan program yang

mengabaikan dimensi ini dapat secara tidak sengaja memperkuat norma-norma patriarki dan melewatkan peluang pemberdayaan holistik.

Pengelolaan lingkungan menawarkan jalan lain di mana kepemimpinan informal di Papua sedang direvitalisasi sebagai respons terhadap tujuan keberlanjutan global. Para pemimpin adat seringkali memiliki pengetahuan ekologis yang diperoleh dari generasi ke generasi, yang memungkinkan mereka untuk memandu pengelolaan sumber daya dengan cara yang seimbang secara ekologis dan diterima secara sosial (Sakata & Prideaux, 2013). Ekowisata berbasis masyarakat, proyek reboisasi, dan upaya konservasi laut semuanya telah diuntungkan oleh kepemimpinan para tetua informal yang menyelaraskan penguasaan tanah adat dengan etika konservasi. Peran mereka sangat menonjol dalam menghadapi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, di mana solusi yang dipaksakan dari luar seringkali gagal mendapatkan perhatian. Meningkatkan peran pemimpin informal sebagai pengelola warisan alam tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga memperkuat identitas budaya dan transfer pengetahuan antargenerasi. Oleh karena itu, mengintegrasikan kepemimpinan adat ke dalam tata kelola lingkungan merupakan keharusan yang pragmatis sekaligus etis.

Dengan demikian, Transformasi kepemimpinan informal di Papua menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pemberdayaan masyarakat. Modernisasi memang menghadirkan tekanan baru, tetapi juga membekali para pemimpin dengan perangkat untuk memperkuat peran mereka dan menjembatani sistem tradisional dan modern. Kapasitas adaptif para pemimpin ini, baik dalam pembangunan perdamaian, kesehatan, pembangunan ekonomi, maupun konservasi lingkungan menunjukkan relevansi mereka yang abadi. Namun, untuk mewujudkan potensi mereka sepenuhnya, para aktor formal harus beralih dari inklusi tokenistik menuju kemitraan sejati dengan para pemimpin informal. Hal ini membutuhkan kerangka kebijakan yang mengakui sistem kepemimpinan plural dan mendukung koeksistensi mereka, alih-alih persaingan. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan kekuatan transformatif kepemimpinan informal untuk pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berlandaskan budaya di Papua.

## 2. SIMPULAN

Pertama, Studi ini menegaskan bahwa kepemimpinan informal berfungsi sebagai mekanisme tata kelola dan pemberdayaan yang tertanam secara budaya di masyarakat pedesaan dan masyarakat adat Papua, terutama di mana lembaga formal lemah atau kurang legitimasi. Para pemimpin seringkali kepala adat, tokoh agama, atau tetua yang dihormati bukan sekadar figur simbolis, melainkan agen perubahan aktif yang memediasi konflik, memobilisasi sumber daya masyarakat, dan melegitimasi upaya pembangunan melalui jalur yang sesuai secara budaya. Otoritas mereka tidak berasal dari kekuatan hukum atau birokrasi, melainkan dari kepercayaan yang mengakar dan kredibilitas moral

yang telah dipertahankan dari generasi ke generasi. Akibatnya, keterlibatan mereka seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan program pemberdayaan, terutama di lingkungan di mana koherensi budaya dan kohesi sosial sangat penting. Seiring meningkatnya kompleksitas dan cakupan intervensi pembangunan, terutama di wilayah yang terisolasi secara geografis dan terpinggirkan secara politik seperti Papua, integrasi kepemimpinan informal tidak hanya menjadi relevan, tetapi juga esensial. Mereka bertindak sebagai penerjemah kebijakan eksternal ke dalam norma-norma lokal, memastikan bahwa proyek tidak dipandang sebagai intervensi asing melainkan sebagai proses yang digerakkan oleh masyarakat. Tanpa mengakui para aktor yang berakar secara budaya ini, risiko pembangunan menjadi praktik yang bersifat top-down dan terputus dari realitas kehidupan masyarakat yang hendak dilayaninya.

Peran transformatif para pemimpin informal dalam menghadapi modernisasi dan tekanan sosial-politik menyoroti kemampuan adaptasi dan relevansi mereka yang terus berkembang dalam tata kelola pemerintahan kontemporer. Alih-alih menolak perubahan, banyak pemimpin informal secara kreatif mensintesis tradisi dengan perangkat modern seperti platform digital, kemitraan LSM, dan usaha berbasis komunitas untuk mempertahankan pengaruh mereka dan memperluas kontribusi sosial mereka. Ketahanan dan inovasi mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan informal tidaklah statis atau regresif, melainkan dinamis dan responsif terhadap tantangan yang muncul seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan transisi antargenerasi. Studi ini juga mengungkapkan bahwa peran hibrida mereka yang mencakup ranah spiritual, sosial, dan politik secara unik memposisikan mereka untuk menjembatani kesenjangan struktural dan mendorong pembangunan yang inklusif dan etis. Mengabaikan dinamika kepemimpinan ini tidak hanya akan meminggirkan suara masyarakat adat tetapi juga melemahkan infrastruktur sosial yang diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan dan kerangka kerja pembangunan harus bergerak melampaui inklusi tokenistik, dan sebaliknya mengarah pada kemitraan autentik yang mengakui legitimasi dan kapasitas transformatif para pemimpin informal. Dengan demikian, jalan Papua menuju pemberdayaan yang tangguh dan berlandaskan budaya dapat menjadi lebih mudah dicapai dan adil.

## REFERENSI

- Bainus, A., Yulianti, D., Sari, D. S., & Setyaka, V. (2025). Women's leadership in cooperative and social movement in the issue of food waste: Evidence from Bandung City. *World Development Sustainability*, 1(1), 100219.
- Elosak, T., Bayage, P., & Yikwa, K. (2025). The picture of the end times man: An expository study based on 2 Timothy 3:1-9 and its implications for the GKII Solafide Arogolik Tulem congregation. *Journal of the American Institute*, 3(1), 132–144.

- Gasson, S., Spencer, E., Bruce, C., & Roberts, N. (2022). *Creating sustainable networks to enhance women's participation in higher education in Papua New Guinea*. ResearchGate.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature review is a part of research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64-71.
- Kharir, A., & Lizamah, M. (2025). Beyond spiritual ritual: Qur'anic khataman as a catalyst for socio-economic solidarity in rural Indonesia. *Surau Journal of Islamic Studies*, 3(1), 22-39.
- Kialo, D. (2014). *New Media Forms to Harness Social Development in Rural Areas of Papua New Guinea*. ResearchGate.
- Lyons, I., & Cavaye, J. (2016). Community-led engagement with government and the role of community brokers in East New Britain, Papua New Guinea. *Society & Natural Resources*, 29(8), 985-1001.
- Marsuki, N. R., & Manda, D. (2025). Constructing sustainable community-based tourism: Institutional challenges and local empowerment in Gowa Regency, Indonesia. *Journal of Humanities and Social Science Studies*, 7(4), 9145-9158.
- McCalman, J., Tsey, K., & Kitau, R. (2012). "Bringing us back to our origin": Adapting and transferring an Indigenous Australian values-based leadership course for community development in Papua. *Community Development*, 43(1), 24-43.
- Munro, J. (2024). West Papuan 'Housewives' with HIV: Gender, marriage, and inequality in Indonesia. *Asian Studies Review*, 48(2), 211-229.
- Paragaye, Y. L., & Liauw, G. (2025). *Peran kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jayawijaya*. IPDN Institutional Repository.
- Sakata, H., & Prideaux, B. (2013). An alternative approach to community-based ecotourism: A bottom-up locally initiated non-monetised project in Papua New Guinea. *Journal of Sustainable Tourism*, 21(7), 880-899.
- Salmawati, S., & Purnomo, A. (2025). Village leadership synergy in facing development challenges in Papua. *Jurnal Noken: Ilmu Sosial*, 7(2), 4244-4257.
- Suhartini, N., & Jones, P. (2019). *Urban Governance and Informal Settlements in Papua*. Springer.
- Thomas, V., Kauli, J., & Fufurefa, E. (2021). Igat wei bilong lukautim mipela yet istap: Community-Based Organisations Responding to COVID-19 in Papua New Guinea. In *COVID in the Islands* (pp. 431-450). Springer.
- Tjilen, A. P., Fitriani, F., & Maturan, A. Y. (2018). Participation in empowering women and

the potential of the local community economy: A case study in Merauke Regency, Papua Province. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(2), 150–160.